

# Perlakuan Akuntansi terhadap Kepemilikan Minoritas dalam Konsolidasi: Perbandingan Implementasi PSAK dan IFRS

Thifani Az Zahro\*<sup>1</sup>

M. Masrukhan<sup>2</sup>

Siska Maria<sup>3</sup>

M. Rivana Maulana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

\*e-mail: [tifani23azahra@gmail.com](mailto:tifani23azahra@gmail.com)<sup>1</sup>, [masrukhan8909@gmail.com](mailto:masrukhan8909@gmail.com)<sup>2</sup>, [siskakaa1612@gmail.com](mailto:siskakaa1612@gmail.com)<sup>3</sup>, [mrivan1713@gmail.com](mailto:mrivan1713@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

Perlakuan akuntansi terhadap kepentingan minoritas atau non-pengendali (NCI) merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam standar akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), terdapat pedoman khusus yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan penyajian KNP. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan penerapan PSAK dan IFRS dalam perlakuan akuntansi di KNP, dengan penekanan pada alokasi laba/rugi, pembagian dividen, dampak penurunan nilai dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

**Kata kunci:** IFRS, Kepemilikan Minoritas, Laporan Keuangan Konsolidasi, PSAK

## Abstract

The accounting treatment of minority or non-controlling interests (NCI) is an important aspect in the preparation of consolidated financial statements. In accounting standards such as the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia and International Financial Reporting Standards (IFRS), there are special guidelines that regulate the recognition, measurement and presentation of KNP. This article aims to compare the application of PSAK and IFRS in accounting treatment at KNP, with emphasis on profit/loss allocation, dividend distribution, impact of impairment and disclosure in consolidated financial statements.

**Keywords:** Consolidated Financial Statements, IFRS, Minority Interest, PSAK

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya hingga saat ini, banyak perusahaan yang memiliki entitas atau anak perusahaan. Perusahaan induk dari anak perusahaan harus menyajikan data keuangan yang menggambarkan kinerja gabungan pengendaliannya. Oleh karena itu, konsolidasi keuangan merupakan topik yang sangat penting dalam bidang akuntansi. Konsolidasi keuangan memberikan pandangan holistik bagi pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan keuangan dan keuangan perusahaan. Dengan benar (Scott, 2015).

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan data historis perusahaan induk dan anak perusahaan. Artinya, aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat dalam laporan konsolidasi sebesar nilai buku aset bersihnya. Pendekatan ini dikenal sebagai metode pengumpulan properti. Jika perusahaan induk memiliki kurang dari 100% anak perusahaan, hal ini mencerminkan kepemilikan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi. Hak minoritas ini terletak di antara liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan, dengan nilai berdasarkan bagian minoritas atas nilai buku aset bersih anak perusahaan (Asiawati et al., 2024).

Permasalahan kepentingan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi telah menjadi salah satu isu yang semakin topikal dalam praktik akuntansi modern berdasarkan standar akuntansi nasional dan internasional. Di Indonesia, laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang berdasarkan prinsip IFRS. Hal ini mencerminkan upaya harmonisasi global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan antar negara.

Fakta bahwa kepentingan minoritas, atau kepentingan non-pengendali, berdasarkan IFRS mencerminkan hak pemegang saham minoritas atas bagian laba, aset, dan liabilitas anak perusahaan dalam sekelompok perusahaan. Meskipun saham-saham tersebut merupakan saham marjinal dibandingkan dengan perusahaan induknya, namun penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Informasi ini penting karena mencerminkan bagaimana keuntungan sekelompok perusahaan didistribusikan antara pemegang saham mayoritas dan pihak non-pengendali. Selain itu, pelaporan KNP yang akurat dalam laporan keuangan konsolidasi membantu pengguna utama laporan keuangan konsolidasi untuk memahami strukturnya. Kepemilikan dan membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat berdasarkan kesadaran risiko dan keekonomian.

Menurut PSAK 65 sebagai dasar pelaporan laporan keuangan konsolidasi, permasalahan kepemilikan minoritas merupakan isu yang sangat penting karena potensi dampaknya terhadap cara perusahaan induk menyajikan anak perusahaannya dalam laporan konsolidasi berdasarkan struktur unit induk dan anak perusahaan. Selama evaluasi laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK 65, standar pedoman yang ditetapkan oleh IASB dianggap sebagai pedoman. Secara global, IFRS 10 sebagian besar konsisten dengan PSAK 65, terutama karena PSAK 65 mempertimbangkan dasar penting pengendalian atas informasi yang diberikan oleh perusahaan induk dan anak perusahaan, sementara IFRS 10 menghadirkan tantangan dalam menentukan batas pengendalian. Tantangan utama IFRS 10 adalah bagaimana IFRS 10 memperlakukan perubahan kepemilikan peserta di entitas induk yang tidak dapat diubah tanpa kehilangan kendali, keluar dari aliansi. Penelitian ini akan menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi kepemilikan minoritas antara PSAK dan IFRS serta pendapat mengenai penerapan yang tepat untuk entitas Indonesia.

### **Kepemilikan Minoritas**

Pemegang saham minoritas adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki suatu saham kepemilikan yang lebih kecil pada perusahaan publik dan tanpa kendali atas manajemen perusahaan. Pemegang saham minoritas adalah orang atau organisasi yang memiliki saham lebih kecil di perusahaan publik dan tidak memiliki kendali atas manajemennya. Jika sahamnya mewakili kurang dari 5% dari seluruh saham yang diperdagangkan di bursa, maka mereka dianggap sebagai pemegang saham.

Pemegang saham minoritas mempunyai tanggung jawab strategis untuk menjamin transparansi, tanggung jawab dan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka memiliki kemampuan untuk memantau kebijakan dan tindakan manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan mencegah terjadinya perselisihan hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas (Bagus Padmanegara, 2024). Pemegang saham minoritas hanya memiliki peran terbatas dalam operasi perusahaan dan berdasarkan keputusan Perusahaan yang ditentukan berdasarkan persentase saham yang dimilikinya cenderung memiliki kekuatan yang lebih kecil untuk mempengaruhi keputusan dibandingkan pemegang saham mayoritas (Hafidz & Al Farizy, 2023).

### **Konsep Konsolidasi**

Konsep Konsolidasi adalah suatu tindakan atau upaya penggabungan dan penguatan lebih dari dua perusahaan untuk membentuk perusahaan baru dan membubarkan perusahaan lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu (Yeyen, 2016). Konsolidasi dalam akuntansi adalah proses penggabungan laporan keuangan entitas induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan keuangan terintegrasi yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kelompok usaha secara keseluruhan. Dalam konteksnya Dalam hal ini kelompok perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, meskipun terdiri dari beberapa badan hukum yang terpisah. Tujuan utama dari konsolidasi adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lengkap kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai situasi ekonomi umum grup.

Suatu entitas ekonomi dianggap berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi jika entitas tersebut menjalankan pengendalian atas entitas ekonomi lain, yang disebut anak perusahaan. Kontrol didefinisikan sebagai kemampuan entitas induk untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaannya untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK)**

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berarti pedoman akuntansi yang berlaku di Indonesia dan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan memenuhi prinsip relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pedoman akuntansi keuangan entitas ekonomi publik tidak bertanggung jawab menggunakan standar akuntansi keuangan entitas ekonomi publik tidak bertanggung jawab (PSAK ETAP) sebagai acuannya (Larassati et al., 2024).

Dirancang untuk menjamin keseragaman pelaporan keuangan bagi entitas yang beroperasi di Indonesia, dan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan dengan berkembangnya standar akuntansi internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, PSAK telah mengalami proses konvergensi dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) agar konsisten dengan praktik global.

Dalam penelitian ini, PSAK yang dibahas adalah PSAK 65 dan PSAK 22. Dalam kerangka akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 65 mengatur bagaimana seharusnya laporan keuangan konsolidasi disusun. Sedangkan PSAK 22 merupakan pernyataan standar akuntansi Keuangan mengatur kombinasi bisnis (Asiawati et al., 2024).

### **International Financial Reporting Standards (IFRS)**

IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional) adalah seperangkat standar akuntansi internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas ekonomi di berbagai negara disusun dengan cara yang seragam, transparan, dan dapat dibandingkan. Standar ini diterbitkan oleh IASB (Dewan Standar Akuntansi Internasional) dan dimaksudkan untuk memberikan panduan informasi keuangan global yang relevan bagi investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini standar IFRS yang dibahas adalah IFRS 10 yang membahas tentang laporan keuangan konsolidasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai arah atau proses pengembangan penelitian yang sesuai. Dengan objek penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2017). Jenis pencarian yang digunakan adalah pencarian perpustakaan. Kajian kepustakaan meliputi pengumpulan data untuk keperluan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat bibliografi atau penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada pokoknya terfokus pada pengkajian secara kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berasal tidak langsung Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari artikel, buku atau dokumen sebagai referensi yang dapat diperbaharui (Fadli, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

## Perbedaan Filosofis antara PSAK dan IFRS

Ketika membandingkan IFRS (International Financial Reporting Standards) dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi yang memengaruhi pendekatan, penerapan, dan penyajian laporan keuangan. Filosofi ini berkembang dari latar belakang kebutuhan pengguna laporan keuangan, regulasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial di mana masing-masing standar diterapkan. Berikut adalah uraian lebih panjang mengenai perbedaan filosofis antara IFRS dan PSAK:

### 1. Prinsip dan Regulasi

Salah satu perbedaan paling mendasar antara IFRS dan PSAK adalah pendekatan yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi. IFRS didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi (*principle-based approach*), yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam penerapan. Pendekatan ini mengutamakan konsep-konsep dasar yang memungkinkan entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan substansi ekonomi transaksi, bukan hanya bentuk formalnya. Filosofi ini memungkinkan profesional akuntansi untuk menggunakan penilaian dan interpretasi mereka dalam menentukan perlakuan akuntansi terbaik bagi transaksi tertentu.

Sebaliknya, PSAK, meskipun telah mengadopsi pendekatan berbasis prinsip dari IFRS, tetap cenderung memberikan panduan yang lebih rinci dan spesifik. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengakomodasi lingkungan akuntansi di Indonesia, di mana tingkat literasi akuntansi dan infrastruktur keuangan masih dalam tahap berkembang. Pendekatan ini sering disebut sebagai campuran antara *principle-based* dan *rule-based*, karena ada penekanan pada panduan yang lebih eksplisit untuk memastikan konsistensi dalam penerapan standar oleh berbagai entitas.

### 2. Orientasi pengguna Laporan Keuangan

IFRS dirancang dengan fokus pada kebutuhan pengguna laporan keuangan global, terutama investor internasional, lembaga keuangan, dan pihak lain yang terlibat dalam pasar modal. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, transparansi, dan komparabilitas laporan keuangan di seluruh dunia, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang konsisten lintas yurisdiksi.

Di sisi lain, PSAK memiliki filosofi yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal. Dalam konteks Indonesia, pengguna laporan keuangan sering kali mencakup otoritas pemerintah, regulator, dan pemegang saham domestik. Oleh karena itu, PSAK dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal, seperti aturan perpajakan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibatnya, laporan keuangan di bawah PSAK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan bagi investor tetapi juga sebagai dokumen kepatuhan yang mendukung proses administrasi dan hukum di Indonesia.

### 3. Harmonisasi Global dan Penyesuaian Lokal

Filosofi IFRS didasarkan pada gagasan harmonisasi global, yaitu menciptakan satu set standar yang dapat digunakan di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan yurisdiksi. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dibandingkan di berbagai negara, sekaligus memudahkan investor internasional untuk memahami laporan tersebut. IFRS menekankan pentingnya keseragaman dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan pasar modal global.

Sebaliknya, PSAK meskipun mengacu pada IFRS, tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal Indonesia. Beberapa standar dalam PSAK telah diadaptasi untuk mengakomodasi realitas ekonomi, sosial, dan hukum di Indonesia. Misalnya, penerapan nilai wajar di PSAK cenderung lebih hati-hati dibandingkan IFRS karena pasar keuangan Indonesia yang belum sepenuhnya matang. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga relevansi dan keberterimaan standar di kalangan perusahaan lokal.

#### 4. Fleksibilitas dan Kepastian Hukum

IFRS dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi dalam penerapan standar. Filosofi ini mengasumsikan bahwa akuntan profesional memiliki tingkat keahlian dan pemahaman yang memadai untuk menafsirkan standar sesuai dengan kondisi spesifik transaksi. Pendekatan ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi dengan lebih baik, meskipun membutuhkan tingkat penilaian profesional yang tinggi.

Sebaliknya, PSAK sering kali menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan standar. Di Indonesia, regulasi akuntansi harus selaras dengan berbagai aturan lain, seperti hukum perusahaan dan perpajakan. Oleh karena itu, PSAK sering memberikan panduan yang lebih eksplisit dan spesifik untuk memastikan penerapannya konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### Perbedaan PSAK dan IFRS dalam memperlakukan Kepemilikan Minoritas

Perbedaan antara PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan IFRS (International Financial Reporting Standards) dalam memperlakukan kepemilikan minoritas (non-controlling interest/NCI) terutama terletak pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Meski PSAK secara garis besar telah mengadopsi IFRS, ada beberapa perbedaan dalam implementasi di Indonesia, terutama terkait karakteristik lokal dan regulasi. Berikut adalah perbandingan keduanya:

##### 1. Pengakuan Kepemilikan Minoritas

Perusahaan yang melakukan penggabungan bisnis/usaha perlu menggunakan laporan keuangan konsolidasi untuk melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi dalam satu perangkat laporan. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan dengan menggabungkan asset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas yang diakuisisi dengan pos yang terkait pada entitas pengakuisisi. Kemudian dilakukan eliminasi transaksi agar menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur (Indriani et al., 2023).

laporan keuangan konsolidasian, kepemilikan minoritas atau non-controlling interest (NCI) diakui berdasarkan PSAK dan IFRS dengan cara yang berbeda. Menurut PSAK 65, kepemilikan minoritas diakui dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai ekuitas. Jumlah tersebut merupakan komponen aset bersih anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk.

IFRS memiliki pendekatan yang serupa, tetapi memberikan pilihan lebih fleksibel dalam pengakuan awal NCI, yaitu menggunakan metode nilai wajar penuh (*full goodwill method*) atau sebagian (*partial goodwill method*) tergantung pada strategi laporan perusahaan (Ulya & Firmansyah, 2021).

Dalam PSAK, dampak pengakuan NCI terhadap laporan keuangan adalah bahwa perubahan kepemilikan Transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi ekuitas karena tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Sebaliknya, dalam IFRS, fleksibilitas metode pengukuran awal dapat memengaruhi total nilai goodwill yang dilaporkan, sehingga menghasilkan perbedaan dalam kualitas informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Pengukuran Kepemilikan Minoritas

Kepemilikan minoritas, atau yang sering disebut sebagai kepentingan nonpengendali, merupakan bagian dari ekuitas perusahaan yang dimiliki oleh pihak lain selain pemegang saham pengendali. Dalam konteks akuisisi bisnis, pengukuran kepemilikan minoritas ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan konsolidasi.

Menurut PSAK 22, kepemilikan minoritas ditentukan dengan mengambil persentase nilai tercatat aset bersih yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Dengan kata lain, persentase kepentingan minoritas akan dikalikan dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, nilai yang dihasilkan ini akan ditampilkan sebagai kepentingan nonpengendali (Asiawati et al., 2024). Pengukuran awal dilakukan sesuai dengan nilai wajar pada tanggal perolehan atau menggunakan proporsi kepemilikan dari nilai wajar aset neto teridentifikasi. Sedangkan IFRS memiliki pendekatan yang serupa dengan PSAK dalam hal pengukuran kepemilikan minoritas. Sejak pengendalian diperoleh hingga dilepaskan, laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk harus memuat pendapatan dan biaya anak perusahaan. Jumlah aset dan liabilitas yang dicatat pada tanggal pembelian digunakan untuk menentukan pendapatan dan biaya anak perusahaan (Asiawati et al., 2024). Kepentingan nonpengendali juga harus dinilai sesuai dengan bagian proporsionalnya dari nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi pada tanggal akuisisi, menurut IFRS 3.

Secara umum, IFRS dan PSAK sebanding dalam hal dasar pengukuran kepemilikan minoritas, yaitu berdasarkan proporsi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Namun, terdapat beberapa perbedaan teknis dalam penerapannya, terutama terkait dengan pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud tertentu.

## 3. Impairment dan Distribusi Laba pada Kepemilikan Minoritas

Penurunan nilai (*Impairment*) mengacu pada pengakuan atas penurunan Nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam konteks kepemilikan minoritas (Kepentingan Nonpengendali/KNP), baik PSAK maupun IFRS memberikan panduan pengakuan dan penyajian, tetapi ada beberapa perbedaan yang signifikan. Pada PSAK, penurunan nilai aset atau beban impairment akan dialokasikan secara adil dan proporsional kepada pemilik induk dan pemilik minoritas secara merata sesuai dengan persentase kepemilikan yang dimiliki masing masing pemilik. Sedangkan pada IFRS, penurunan nilai aset atau beban impairment memperbolehkan goodwill dialokasikan secara penuh pada pemilik induk apabila kepemilikan minoritas diukur dengan nilai wajar, jika kepemilikan minoritas diukur menggunakan nilai proporsional maka impairment akan dialokasikan secara merata antara kepemilikan induk dan kepemilikan minoritas.

Sebelum IFRS diadopsi, perusahaan mencatat pembelian menggunakan metode pembelian sesuai dengan PSAK 22 sebelum beralih ke IFRS. Perusahaan menggunakan metode pengambilalihan untuk mendistribusikan kepada pemegang saham minoritas sesuai dengan nilai buku aset bersih mereka setelah mengamortisasi goodwill dan goodwill negatif. Setelah penerapan IFRS, perusahaan Indonesia harus mengubah pelaporan keuangan mereka agar sesuai dengan PSAK No. 22, yang telah diubah untuk menggunakan IFRS. Perusahaan sekarang harus

menguji penurunan nilai setiap tahun dan mencatat penurunan nilai dalam laporan laba rugi mengamortisasi goodwill berdasarkan PSAK 22 yang baru (Muhamad Riswantoro et al., 2023).

Distribusi laba/rugi kepada pemegang kepemilikan minoritas (atau disebut Kepentingan Nonpengendali, KNP) dalam PSAK dan IFRS memiliki banyak kesamaan, mengingat PSAK sebagian besar telah mengadopsi IFRS. Namun, terdapat beberapa perbedaan kecil terkait penerapan praktis dan penyesuaian lokal. Berdasarkan PSAK 1, PSAK 65, dan IFRS 10, pembagian atau distribusi laba/rugi bersih antara pemilik induk dengan pemilik minoritas diatribusikan sesuai dengan porsi dan haknya masing-masing. Kemudian PSAK dan IFRS juga mengharuskan distribusi laba/rugi untuk diungkapkan secara individual dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

#### 4. Pendistribusian Dividen pada Kepemilikan Minoritas

Memperoleh dividen merupakan insentif utama bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Dividen merupakan bagian dari pendapatan atau laba perusahaan yang jumlahnya ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada pemegang saham, atau dapat dipahami sebagai sejumlah uang yang diterima dari laba perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan kata lain, dividen pada hakikatnya adalah laba bersih—yakni laba tanpa rugi—yang diperoleh perusahaan selama kurun waktu tertentu dan dibagikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dalam situasi keuangan perusahaan yang tidak menguntungkan atau beroperasi dengan baik, dividen tidak dapat dibayarkan. Oleh karena itu, pada kenyataannya, investor yang ingin memperolehnya sering kali perlu bersiap untuk menyimpan saham yang telah dibelinya minimal selama satu tahun. Hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan karena didasarkan pada persyaratan bahwa perusahaan publik harus mengungkapkan laporan keuangan setiap tahun, yang mencakup kewajiban untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Namun, perlu dicatat bahwa dividen hanya akan dibayarkan kepada pemegang saham satu kali dalam setahun, bergantung pada komposisi kepemilikan dan jumlah sahamnya (Agus, 2018).

Sedangkan dalam kasus pendistribusian dividen kepada kepemilikan minoritas dalam suatu entitas yang dikonsolidasikan tergantung pada proporsi kepemilikan nonpengendali (KNP) atau kepemilikan minoritas dalam ekuitas entitas anak. Dividen yang diterima oleh pemegang saham minoritas mencerminkan bagian mereka atas laba bersih entitas anak, sesuai dengan porsi saham yang mereka miliki

#### 5. Studi Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan dalam IFRS dan PSAK

No.	Perbedaan	PSAK	IFRS
1.	Komponen Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas

			<p>5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)</p> <p>6. Laporan posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi.</p>
2.	Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan	<p><b>Aset =</b></p> <p>Aset Lancar</p> <p>Aset Tidak Lancar</p> <p><b>Liabilitas =</b></p> <p>Liabilitas jangka pendek</p> <p>Liabilitas jangka panjang</p> <p><b>Ekuitas =</b></p> <p>Ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk Hak nonpengendali</p>	<p><b>Aset =</b></p> <p>Aset Tidak Lancar</p> <p>Aset Lancar</p> <p><b>Ekuitas =</b></p> <p>Ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk Hak nonpengendali</p> <p><b>Liabilitas =</b></p> <p>Liabilitas jangka panjang</p> <p>Liabilitas jangka pendek</p>
3.	Istilah Minority Interest	Menggunakan istilah hak minoritas	Istilah minority interest (hak minoritas) diganti menjadi non-controlling interest (hak nonpengendali) dan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
4.	Pos Luar Biasa ( <i>extraordinary item</i> )	Masih memakai istilah pos luar biasa ( <i>extraordinary item</i> )	Tidak mengenal istilah pos luar biasa ( <i>extraordinary item</i> )
5.	Penyajian Liabilitas Jangka Panjang yang akan dibiayai kembali	Tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang	Liabilitas jangka panjang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah selesai setelah periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan

Source: (Putra et al., 2019)

## KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi terhadap kepemilikan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasian merupakan aspek penting yang diatur secara komprehensif baik oleh PSAK maupun IFRS. Kedua kerangka standar ini memberikan pedoman yang bertujuan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas secara wajar dengan tetap menghormati hak dan kepentingan pemegang saham minoritas.

Secara keseluruhan, perbandingan implementasi PSAK dan IFRS menunjukkan keselarasan prinsip akuntansi global dan lokal dalam memperlakukan kepemilikan minoritas. Hal ini mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan, baik untuk kebutuhan pelaporan domestik maupun internasional. Namun, kesuksesan implementasi memerlukan pemahaman yang mendalam dan konsistensi penerapan oleh entitas pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2018). *PEMEGANG SAHAM DAN PEMBAGIAN DIVIDENNYA*. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/23/pemegang-saham-dan-pembagian-dividennya/>
- Asiawati, I., Lestari, C. B., & Uzliawati, L. (2024). Implementasi PSAK 22 Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS pada Laporan Keuangan PT Kalbe Farma, Tbk. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7283–7295. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9859>
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Fadli%2C+M.+R.+%282021%29.+Memahami+desain+metode+penelitian+kualitatif.+Humanika%2C+Kajian+Ilmiah+Mata+Kuliah+Umu m%2C+21%281%29%2C+33-54.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fadli%2C+M.+R.+%282021%29.+Memahami+desain+metode+penelitian+kualitatif.+Humanika%2C+Kajian+Ilmiah+Mata+Kuliah+Umu m%2C+21%281%29%2C+33-54.&btnG=)
- Hafidz, D. P., & Al Farizy, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.39032>
- Indriani, R., Azahra, K., Rahmania, A., Aryantina, R., Panggiarti, E. K., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2023). *PENERAPAN PSAK 65 DAN HUBUNGANNYA DENGAN PSAK 22 TENTANG KOMBINASI BISNIS PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI*. 2(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musyitari.v2i8.1342>
- Larassati, V., Zain, P. M., Shaginah, M., & Masrukhan, M. (2024). PERLAKUAN AKUNTANSI PENJUALAN ASET TETAP ANTAR PERUSAHAAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA PSAK DAN IFRS. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 10(4), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musyitari.v10i4.7011>
- Muhamad Riswanto, Wisnu Pramudya, Ahmad Danu, & Endang Kartini Panggiarti. (2023). Analisis Akuntansi Kombinasi Bisnis Dengan Konvergensi IFRS Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 81–89. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i1.596>
- Putra, T. A. P. S., Tusholihah, M., Retnawati, K., & Maje, G. I. L. (2019). Dampak Dan Upaya Penerapan IFRS Pada Pelaporan Keuangan Terhadap Perusahaan Di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 284–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.14>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory*. Pearson. [http://repository.iuk.ac.ke:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/38/Financial Accounting Theory %287th Edit... %28Z-Library%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.iuk.ac.ke:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/38/Financial%20Accounting%20Theory%287th%20Edit...%28Z-Library%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Ulya, N. M., & Firmansyah, A. (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI KOMBINASI BISNIS SEBELUM DAN

SETELAH ADOPTI IFRS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KONSUMSI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(1), 6. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i1.5064>

Yeyen, F. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah di Kecamatan Ciputat*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33815>